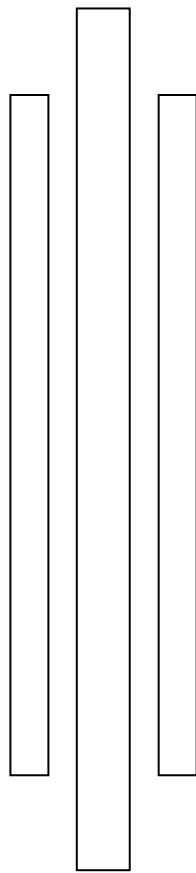




**RENCANA KERJA KECAMATAN KUTOWINANGUN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUTOWINANGUN  
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

td

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

td

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMARA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN.  
SETDA  
IRA PUSPITASARI, SH., M.Lc., Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan	10
D. Sistematika Penyusunan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
C. Isu-Isu Penting Penyelegaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	27
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Kebumen	30
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	47
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
C. Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V PENUTUP	61

## DAFTAR TABEL

Hal

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.	9
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.	20
3. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.	24
4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kebumen.	32
5. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutowinangun.	39
6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Prakiraan Maju Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022.	43

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 (hasil entry SIPD);
2. Berita Acara hasil Musrenbangcam Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020;
3. Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Tahun 2020;
4. Notulen rapat Musrenbang Kecamatan Tahun 2020;



## KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan 2023.

Kebumen, 10 September 2021

KECAMATAN KUTOWINANGUN,  
  
**L. KOTIB**  
Pembina Tk.I

NIP. 19640405 199401 1 001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Kutowinangun sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Kecamatan Kutowinangun berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara penyusunan Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,*

*Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*". Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Kutowinangun adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: *"Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi"*.

Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
34. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);



35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
36. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang-Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo-Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun tahun 2022 disusun dengan **maksud** untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang perpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Tahun terakhir 2021-2026. Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Tahun 2022.

Berpijak pada maksud tersebut, maka **tujuan** penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutowinangun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan Kutowinangun.
2. Sebagai acuan Kecamatan Kutowinangun dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutowinangun dalam rangka mencapai visi, misi Kabupaten Kebumen.
3. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022.

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun tahun 2022.

#### **D. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kutowinangun disusun sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTOWINANGUN TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2020. Capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutowinangun serta penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kutowinangun, serta program dan kegiatan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Penganggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022.

Bab V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Renja Tahun 2022 (hasil entry SIPD).
2. Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan Kutowinangun tahun 2020.
3. Daftar hadir Musrenbang Kecamatan tahun 2020.
4. Notulen rapat Musrenbang Kecamatan tahun 2020.
5. Tabel Kerja Pemetaan Program dan Kegiatan Renstra/RPJMD ke dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN KUTOWINANGUN TAHUN LALU**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Kecamatan Kutowinangun. Tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah disusun dan kegiatan yang telah dilaksanakan bisa dilihat dari LKjIP dan LK SKPD Tahun 2020. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan, dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait hal tersebut Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja manajemen perkantoran, dari hasil evaluasi dan pengukuran program dan kegiatan Capaian, indikatornya adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, jasa alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jasa makan minuman, dengan capaian mencapai 85,18 % dari 100%.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan perizinan lainnya, dengan capaian indikatornya tercukupinya sarana dan prasarana dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kutowinangun dengan capaian 93,95 %.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dengan indikator kinerjanya tersedianya database tahun 2020 dan

tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Kecamatan Kutowinangun dengan capaian mencapai 76,13 %.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja tersusunnya IPMD dan terselenggaranya Musrenbangcam dengan capaian sebesar 97,60%.
5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan desa, dengan indikator kinerja terfasilitasi desa dalam penyusunan APBDes, tersusunnya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat/desa, jumlah program pembangunan yang masuk desa dan meningkatkan pengetahuan perangkat desa tentang administrasi dengan capaian mencapai 83,34%.
6. Meningkatkan program pembangunan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja terselenggaranya rakor TKP2KDes, terbinanya organisasi TP-PKK Desa dan Perekonomian masyarakat melalui kegiatan Kuota Kecamatan dengan capaian 91,70%.
7. Pembinaan organisasi pemuda dan masyarakat lain dalam rangka peningkatan peran dalam pembangunan, kesadaran berbangsa dan berpolitik serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerja terselenggaranya pilkades, jumlah organisasi pemuda yang dibina, meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan terselenggaranya pelatihan linmas dengan capaian mendekati 6,67%.

Realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan Tahun 2020 (N-2) sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Program/ Kegiatan**  
**Kecamatan Kutowinangun**  
**Kabupaten Kebumen Per 31 Desember 2020**

Kode Program	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
Non Program	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.843.119.000</b>	<b>1.757.705.226</b>	<b>95,37</b>	<b>100</b>
	Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.322.089.000	1.295.510.366	97,99	100
	Tambahan Penghasilan PNS	521.030.000	449.675.860	86,31	
	Intensif Pemungutan Retribusi Daerah	13.733.000	12.519.000	91,16	100
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>440.746.000</b>	<b>363.888.591</b>	<b>82,57</b>	<b>100</b>
4.01.4.01.10.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.784.000	142.052.391	85,18	100
4.01.4.01.10.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.377.000	70.761.100	89,15	100
4.03.4.01.10.15	Pengembangan	9.725.000	9.724.000	99,99	100



Kode Program	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
	Data/Informasi				
2.14.4.01.10.15	Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	1.302.000	3.515.000	41,12	100
4.01.4.01.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	0	0	0
1.06.4.01.10.16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.210.000	1.969.900	37,81	100
2.13.4.01.10.16	Peningkatan peran serta kepemudaan	2.646.000	0	0	0
1.05.4.01.10.17	Pengembangan wawasan kebangsaan	31.638.000	2.100.000	6,67	100
2.07.4.01.10.17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	28.208.000	23.775.000	83,34	100
2.07.4.01.10.19	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	11.460.000	10.247.200	91,70	100
4.01.4.01.10.20	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	87.203.000	87.191.000	76,13	100
4.03.4.01.10.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	17.193.000	12.553.000	97,60	100
	<b>Jumlah</b>	<b>2.283.865.000</b>	<b>2.121.593.817</b>	<b>92,90</b>	

Sumber: LK SKPD Tahun 2020

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun tahun lalu (Tahun N-2/ 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun N-1/ 2021), tahun 2021 masih terdampak virus corona yang menjelma menjadi pandemi merambah seantero dunia termasuk Indonesia dan Kabupaten Kebumen termasuk yang terkena imbas pandemi covid 19, dampak bencana non alam tersebut mengakibatkan segala perekonomian warga, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mengambil kebijakan dalam penanganan bencana non alam dengan merasionalisasi anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, hasil evaluasi dibawah ini menjelaskan target Rencana Strategis 2021 sampai dengan awal tahun periode Renstra (2022/N-0), realisasi target kinerja sampai dengan awal tahun ke 1 periode Renstra (2021/N-0), target realisasi dan tingkat capaian tahun ke 4 periode Renstra (2020/N-2) dan prakiraan realisasi capaian target program dan kegiatan tahun berjalan, tahun ke 5 periode Renstra (2021/N-1), kegiatan yang bersifat teknis sebagai berikut :

Program pelayanan administrasi perkantoran terdapat beberapa kegiatan diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan

jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor dan kegiatan yang lain sudah mencapai target. Dalam kegiatannya program perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk mengadakan penyelenggaraan Musrenbangcam dan rakor dan inventarisasi proyek masuk desa (IPMD).

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan pokok kegiatannya berupa Pelatihan Linmas, Sosialisasi bagi UMKM dan generasi muda akan bahaya miras dan narkoba dari tahun 2016 sampai dengan tahun N-1 telah dilaksanakan dengan baik dari target Renstra 100 % realisasi capaian 100%, hal ini membawa dampak yang positif dengan menurunnya kasus kriminal, meningkatnya kesadaran pengusaha UMKM, demikian juga program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan pokok kegiatannya berupa penyusunan data PMKS dan PSKS dan Rapat koordinasi TKP2KDes dari tahun ke tahun selalu diadakan verifikasi dan validasi sehingga data yang tersaji betul betul akurat sesuai yang diharapkan, untuk jelasnya secara detail sebagaimana dapat dilihat dan tersaji pada tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutowinangun dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Kutowinangun s/d 2021 Kabupaten Kebumen**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						<b>Kecamatan Kutowinangun</b>									
7	01	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renstra 26, Renja, RKA, DPA, DPAP, LPPD)	15	5	5	5	100	5	15	100
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	33	28	28	100	29	90	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya jumlah ASN yang mendapat Gaji, Tunjangan dan Tamsil	51	19	18	18	100	14	51	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
									Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dokumen Pengelola Adiministrasi Keuangan	26	8	9	9	100	9	26	100
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantro	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan perundang-undangan (suara merdeka, kebun exspres dan tabloid)	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi	72	48	12	12	100	12	72	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan						
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan mebel (kursi rapat, kursi kerja dan sofa busa)	123	35	44	44	100	44	123	100
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, printer)	7	0	6	6	100	1	7	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit pemeliharaan Barang milik Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	72	48	12	12	100	12	72	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
									Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	9	9	9	100	7	25	100
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	4	4	4	100	4	12	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	17	5	6	6	100	6	17	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	3	1	1	1	100	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	57	19	19	19	100
7	01	06	2	01	08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35	17	0	0	0
7	01	06	2	01	10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kawasan perdesaan	8	2	3	3	100
7	01	06	2	01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Partisipatif Pembangunan	Jumlah yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes 19 Desa, 1 x Pra Musrenbangcam	60	20	20	20	100
7	01	06	2	01	16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan rapat/rakor yang difasilitasi Kecamatan	30	8	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan						
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah fasilitasi kegiatan TKP2KDes dan Bansos sembako	14	4	5	5	100	5	14	100



Capaian survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Kutowinangun terutama dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran dan akte kematian) dari tahun ke tahun cukup memuaskan dari target Renstra tahun 2020 sebesar “ 85 “ realisasinya sebesar “85” (hasil survey tanggal 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020) sedang kan untuk proyeksi tahun 2021, 2022, 2023 diharapkan sama seperti tahun sebelumnya.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan terlaksananya pelatihan bagi anggota linmas dan koordinasi dengan babinkamtibmas bisa terlaksana dengan baik sehingga keamanan dan kenyamanan diwilayah kecamatan Kutowinangun bisa kondusif. Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bisa tercapai dengan kegiatan fasilitasi TKP2KDes.

Capaian kepuasan pelayanan masyarakat Kecamatan Kutowinangun dalam penyelenggaraan pelayanan Publik khususnya (KTP, KK, Akte Kelahiran dan kematian Tahun 2021 berjalan dengan baik dari Renstra tahun 2021 sudah mencapai sebesar 87 % dan diharapkan mencapai target 100% diakhir Tahun 2021.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di dalamnya ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada penerima layanan.

Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes, secara transparan sesuai RKPDDes di Kecamatan Kutowinangun juga cukup baik dalam arti bahwa dari 19 Desa dikecamatan Kutowinangun rata rata terpenuhi, sesuai target dan jadwal walau masih ada kekurangan dan perbaikan sedikit.

Prosentase tersediannya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dilihat dari jumlah desa yang melaksanakan pendataan terutama data PSKS dan PMKS dari 19 Desa sudah masuk semua terutama untuk tahun 2020, sedang untuk tahun 2021 akibat pandemi Covid 19 masih ada perbaikan perbaikan yang perlu disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3 Target, Realisasi Capaian dan Proyeksi yang akan datang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan			85%	86%	92%	95%	84%	85%	85%	92%	

Secara umum realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tercapai 100%. Namun ada beberapa program yaitu sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor masih dibawah target. Ke dua kegiatan tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Bencana Nasional Non Alam Pandemi Covid-19 dan Rasionalisasi anggaran.

## B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Kutowinangun mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- 2) pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Kutowinangun diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun**  
**Kabupaten Kebumen**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	85%	85%	86%	92%	85%	84%	85%	92%	

### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutowinangun**

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan PD lainnya (Badan, Dinas, Kantor), perbedaan tersebut yaitu bahwa PD lainnya melaksanakan tugas bersifat teritorial (kewilayahan). Tugas kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang berbeda antara PD Kecamatan dengan PD yang bukan Kecamatan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien.

Keterbatasan kewenangan tersebut dari sisi lain tugas dan fungsi kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan PD setingkat kantor menjadikan capaian kinerja Kecamatan kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal dimasa-masa mendatang.

Kecamatan Kutowinangun dalam memberikan pelayan masih di prioritaskan dalam:

1. Adanya Bencana Nasional Non Alam Covid-19 dan penanganan Bansos dari dampak Corona sehingga perangkat Daerah harus melaksanakan Rasionalisasi Anggaran. Ada 19 Desa di Wilayah Kecamatan Kutowinangun telah menganggarkan untuk penanganan pandemi covid-19 berupa alat Kesehatan, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial berupa sembako.
2. Kecamatan Kutowinangun memiliki Penduduk sebanyak 42.572 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 20.812 jiwa dan Perempuan sebanyak 21.076 jiwa, yang membutuhkan pelayanan paten public KK, KTP, Akte kelahiran, Akte Kematian dan surat pengantar lainnya.

3. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) pada 19 Desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun yang bersumber dari DD, ADD, Banprov, Bagi Hasil Pajak dan dari sumber lainnya yang sah Tahun 2020 sudah terealisasi 100% sedangkan untuk APBDes tahun 2021 sampai bulan September sudah terserap 78,6% dan ditargetkan sampai bulan Desember bisa terserap 100%.
4. Pada tahun 2020 ada 8 dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditahun 2021 bertambah 14 Desa, sehingga Kecamatan Kutowinangun melaksanakan fasilitasi melalui rapat koordinasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BUMDes.
5. Jumlah Penduduk miskin pada tahun 2020 terdapat 3.935 KK. Penanggulangan Kemiskinan dengan berupa bantuan BPNT, RLTH, BST dan anggaran dari Pemerintah Desa berupa Dana tidak terduga berupa bantuan keuangan di 22 Desa di Wilayah Kutowinangun kepada masyarakat terdampak Covid-19 (BST Himbara/Perluasan BST maupun Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa)
6. Dalam pelaksanaan pemutakhiran IDM yang berbasis SDG's sudah dilaksanakan di Desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun sebanyak 18 Desa sampai bulan Juni 2021 sudah menetapkan berita acara Musyawarah Penetapan Hasil Pendataan SDGs, tinggal 1 Desa yang belum menetapkan berita acara penetapan SDGs di targetkan sampai bulan Desember sudah 100% . Sedangkan proses input ke aplikasi sedang proses .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat

mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

3. Penyusunan siklus tahunan desa belum sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan dan masih mengalami keterlambatan dalam pelaporannya.
4. Kemampuan dan ketrampilan perangkat desa sangat terbatas dan tidak merata.
5. Pengelolaan kearsipan desa masih belum dilaksanakan sesuai Sistem Kearsipan Daerah.
6. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah masih rendah.
7. Ruang penyimpanan arsip in aktif kurang memadai.
8. Penyerahan arsip-arsip in aktif ke kantor arsip daerah terkendala prosedur dan SDM yang terbatas.

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

#### Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada

masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.

2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### **D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen melalui tahapan tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang undang Nomor 25 tahu 2004 melalui penjabaran visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021



tidak sesuai dengan rumusan program dan kegiatan hal ini disebabkan karena mengalami perubahan nomenklatur program dan kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 selain perubahan Nomenklatur juga mengalami rasionalisasi sebagai dampak Bencana Non Alam pandemi Covid 19 di Kabupaten Kebumen, Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada.

Adapun review terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, sebagaimana tertera dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022**  
**Kabupaten Kebumen**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kutowinangun

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>10,500,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>10,500,000</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,000,000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1,688,912,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1,688,912,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,678,164,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Cakupan Pelayanan Penunjang	100%	1,678,164,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,748,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,748,000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>51,143,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>51,143,000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,200,000	
	Penyediaan Bahan/ Material		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	100%	18,943,000	Penyediaan Bahan/ Material		Cakupan Pelayanan	100%	18,943,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,000,000	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>38,500,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>104,500,000</b>	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	37,,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kecamatan Kutowinangun	Presentase penyelenggaraan penunjang urusan	100%	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kecamatan Kutowinangun	Presentase penyelenggaraan penunjang	100%	30,000,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemerintahan			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		urusan pemerintahan			
	Pemeliharaan Mebel		Presentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan	100%	5,000,000	Pemeliharaan Mebel		Presentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan	100%	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Presentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan	100%	3,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Presentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan	100%	7,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi			-	-				-	-	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>38,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>40,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	20,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	20,000,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>11,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>22,000,000</b>	
	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutowinangun		100%	11,000,000	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutowinangun		100%	22,000,000	
7	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>93,150,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>90,000,000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutowinangun	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	100%	93,150,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutowinangun	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	100%	90,000,000	
8	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>25,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>25,000,000</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan	100%	25,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan	100%	25,000,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
9	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>79,500,000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>79,500,000</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah Desa	100%	25,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah Desa	100%	25,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah Desa	100%	4,500,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah Desa	100%	4,500,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah Desa	100%	38,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawassan Pemerintah	100%	38,000,000	

No.	Rancangan Awal Renja 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Desa			
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	10,000,000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	2,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kutowinangun	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	2,000,000	



## E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2020. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan/desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Kutowinangun :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Prioritas Usulan Dana Afirmasi Pembangunan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022**  
**Kabupaten Kebumen**

Nama SKPD : Kecamatan Kutowinangun

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu	Desa Jlegiwinangun, Triwarno, Korowelang, Pejagatan, Ungaran, Mrinen, Lumbu, Babadsari Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya Bahan Mie Soun	200.000.000	DISTAPANG
2.	Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu	Desa Tunjungseto, Pekunden, Kaliputih, Pesalakan Kecamatan Kutowinangun	Tersedianya Bahan Baku dan Meningkatnya Produski Emping Mlinjo	107.000.000	DISTAPANG
3.	Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu	Desa Tunjungseto, Pekunden, Kaliputih, Pesalakan Kecamatan Kutowinangun	Terfasilitasinya Pengembangan Budidaya Lebah Madu	150.000.000	DISTAPANG
<b>JUMLAH</b>				<b>457.000.000</b>	

**Tabel 2.5**  
**Daftar Rekapitulasi Prioritas Usulan Desa Kecamatan**  
**Kutowinangun Tahun 2022**  
**Kabupaten Kebumen**

Nama SKPD : Kecamatan Kutowinangun

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Desa Pekunden	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) / Pelatihan Kuliner	4.050.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umum)	Desa Pekunden	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) / Pelatihan tukang Kayu	50.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Pekunden	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan / Sarana dan Prasarana PKD dan PUSTU	55.000.000	Dinas Kesehatan
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Desa Pekunden	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	50.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Desa Pekunden	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Desa Pekunden	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Saluran Pembuangan Limbah	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Program Pengembangan UMKM	Desa Kuwarisan	Terlaksananya Pelatihan untuk IKM Kabupaten Kebumen	40.500.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
8.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Desa Kuwarisan	Pelatihan kreasi dan Optimalisasi Penggunaan Bahan Baku Lokal (umbi-umbian)	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Kuwarisan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sarana Prasarana PKD dan PUSTU)	55.000.000	Dinas Kesehatan
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Desa Kuwarisan	Sarana Olah Raga Pendidikan	20.189.655	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
11.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa Kuwarisan	Bantuan Bibit Ternak Kambing pada Desa Mandiri Pangan	135.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
12.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Kuwarisan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Desa Kutowinangun	Terlaksananya Pelatihan IKM Kab. Kebumen	40.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Kutowinangun	Pengadaan Traktor Roda Dua 8,5 PK	28.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
15.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/ Galur Ternak	Desa Kutowinangun	Bantuan Ternak Kambing	55.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
16.	Program Pengelolaan Arsip	Desa Kutowinangun	Pengelolaan Arsip Desa yang Difasilitasi	800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17.	Program Pengelolaan Pendidikan	Desa Kutowinangun	Terwujudnya/ Terselenggaranya Paket Permainan Edukatif	10.000.000	Dinas Pendidikan
18.	Program Pengelolaan	Desa	Tersedianya Alat	10.000.000	Dinas

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendidikan	Kutowinangun	Permainan edukatif untuk PAUD/TK		Pendidikan
19.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Desa Tunjungseto	Terselenggaranya Pelatihan Kreasi dan Optimalisasi Bahan Baku (Limbah Kayu/Pertukangan)	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Desa Tunjungseto	Terselenggaranya Pelatihan Kreasi Berbahan Baku Umbi-umbian	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Tunjungseto	Pengadaan Pompa Air 6 Inch	36.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
22.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Tunjungseto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jalan Usaha Tani (JUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Desa Tunjungseto	Tersedianya stok bahan pangan di Limbung Masyarakat	45.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Desa Tunjungseto	Terbangunnya Drainase di desa tunjungseto	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	Program Pengembangan UMKM	Desa Mrinen	Bantuan Peralatan bagi IKM Kab. Kebumen Kelompok IKM logam Desa Mrinen Kec. Kutowinangun dan IKM bengkel peserta Pelatihan TA 2019	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26.	Program Pengembangan UMKM	Desa Mrinen	Pelatihan las/knalpot bagi IKM Kab. Kebumen Kelompok IKM logam Desa Mrinen Kec. Kutowinangun	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Mrinen	Peningkatan Sarpras Pustu dan PKD Pengadaan Paket Sarpras Posbindu KIT	0	Dinas Kesehatan
28.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Desa Mrinen	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pendidikan	0	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
29.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	Desa Mrinen	Peningkatan/Rehabilitasi Pelengkap Jalan/Bronjong Normalisasi Saluran Drainase	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.	Program Pengelolaan Pendidikan	Desa Mrinen	Pengadaan Mebelair PAUD	0	Dinas Pendidikan
31.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Lundong	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil	5.000.000	Dinas Kesehatan
32.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	Desa Lundong	Bantuan Ternak Kambing	55.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
33.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Lundong	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
34.	Program Pengelolaan Arsip	Desa Lundong	Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Arsip	5.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
35.	Program Pengembangan Kebudayaan	Desa Lundong	Tersedianya Alat Rebana	10.000.000	Dinas Pendidikan
36.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Desa Lundong	Tersusunnya PERDES tentang Lingkungan Hidup	10.000.000	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
37.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Desa Korowelang	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas/pustu dan Jaringannya	55.000.000	Dinas Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Korowelang	Pengadaan Traktor Rotari	37.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
39.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Korowelang	Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat	45.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
40.	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungan	Desa Korowelang	Terbangunnya Jembatan Antar Desa	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Korowelang	Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	0	Dinas Pertanian dan Pangan
42.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Korowelang	Pembangunan Jaringan Irigasi air tanah (JIAT)	250.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
43.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Desa Pejagatan	Terwujudnya Pembangunan Gedung/Konstruksi PKD	55.000.000	Dinas Kesehatan
44.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Desa Pejagatan	Terpenuhiya Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (Antrometer KIT)	4.500.000	Dinas Kesehatan
45.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Pejagatan	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
46.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Pejagatan	Kelapa GEK	30.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
47.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Pejagatan	Terpeliharanya jalan Kabupaten	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Desa Pejagatan	Hibah dan Bansos Barang	2.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Desa Pejagatan	Hibah dan Bansos Barang	2.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
50.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Desa Tanjungsari	Sarana Prasarana PKD Pustu	55.000.000	Dinas Kesehatan
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Tanjungsari	Pengadaan Pompa Air 2 Inch	49.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
52.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	Desa Tanjungsari	Bantuan Ternak Sapi	65.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
53.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Tanjungsari	Pelebaran Jembatan pasar pengilon desa tanjungsari	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Tanjungsari	Pelebaran Jembatan	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55.	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Desa Tanjungsari	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
56.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	PKD Desa Tanjungmeru	Tersedianya Sarana Prasarana PKD	55.000.000	Dinas Kesehatan
57.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Posbindu Desa Tanjungmeru	Tersedianya Sarana Prasarana Posbindu KIT	7.500.000	Dinas Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Gapoktan Sri Rejeki Desa Tanjungmeru	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
59.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Gapoktan Sri Rejeki Desa Tanjungmeru	Jalan Usaha Tani (JUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
60.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Desa Tanjungmeru	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
61.	Program Pengelolaan Pendidikan	Desa Tanjungmeru	Permainan Edukatif	10.000.000	Dinas Pendidikan
62.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Desa Babadsari	Sarana dan Prasarana PKD dan Pustu	55.000.000	Dinas Kesehatan
63.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	Desa Babadsari (Kelompok Tani Ternak Sediyo Rukun Babadsari)	Bantuan Ternak Kambing	55.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
64.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Babadsari (Gapoktan Tunggal Makmur)	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
65.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Babadsari (Gapoktan Tunggal Makmur)	Jalan Usaha Tani (JUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
66.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dk. Blawong Desa Babadsari	Pembangunan Jalan K1 dari Dk. Blawong Desa babadsari sampai dengan Perbatasan Desa Lumbu	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Babadsari	Pengembangan Desa Wisata Seribu Bunga	200.000.000	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
68.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Ungaran	Sarana Prasarana PKD dan Pustu	55.000.000	Dinas Kesehatan
69.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Ungaran	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
70.	Program Pengembangan Kebudayaan	Desa Ungaran	Terpenuhinya Alat Kesenian Rebana (Bantuan Perlengkapan Alat Kesenian)	20.000.000	Dinas Pendidikan
71.	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Desa Ungaran	Terbangunnya RTLH yang di bangun	75.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
72.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun	Kampung KB yang melaksanakan KKBPK	22.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
73.	Program Pengelolaan Prikanaan Budidaya	Desa Ungaran	Hibah dan Bansos barang	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
74.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Triwarno	Tersedianya Sarana dan Prasarana PKD dan Pustu	55.000.000	Dinas Kesehatan
75.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Desa Triwarno	Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
76.	Program Pengelolaan	Desa Triwarno	Terbangunnya Prasarana	200.000.000	Dinas

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sumber Daya Air (SDA)		Pertanian		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Desa Triwarno	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaaan	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78.	Program Pengembangan Perumahan	Desa Triwarno	Bansos Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan PERmukiman dan Lingkungan Hidup
79.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Karangsari	Sarana Prasarana PKD dan PUSTU	55.000.000	Dinas Kesehatan
80.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	Desa Karangsari Rt 02 Rw 02 (KTT Lembu Suro)	Bantuan Ternak Sapi	65.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
81.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Karangsari Rt 03 Rw 01 – Rt 03 Rw 01 Kelompok Tani Sri Rejeki	Jalan Usaha Tani (JUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
82.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Karangsari Rt 03 Rw 01 Kelompok Tani Sri Rejeki	Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
83.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Desa Karangsari RT 01 Rw 02- RT 04,Rw 01	Jumlah Drainase yang di Normalisasi	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Karangsari Rt 01 Rw 02	Jumlah jalan kabupaten yang terpelihara	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Kaliputih	Pengadaan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Posbindu KIT	55.000.000	Dinas Kesehatan
86.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa Kaliputih	Terpenuhinya Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (Antrometer KIT)	4.500.000	Dinas Kesehatan
87.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Desa Kaliputih	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	50.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
88.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Desa Kaliputih	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
89.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Kaliputih	Pemeliharaan Jalan ruas kaliputih-jatipurus poncowarno	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Desa Kaliputih	Pemasangan LPJU	40.000.000	Dinas Perhubungan
91.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Mekarsari	Terpenuhinya sarana pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	4.500.000	Dinas Kesehatan
92.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Mekarsari	Pengadaan Pompa Air 4 Inch	24.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
93.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Desa Mekarsari	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	50.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
94.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Desa Mekarsari	Pembangunan Drainase	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Penataan Ruang
95.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Desa Mekarsari	Pengadaan Alat Rebana	10.000.000	Dinas Pendidikan
96.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Desa Mekarsari	Tersusunnya PERDES tentang Lingkungan Hidup	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
97.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Lumbu	Dukungan Pelaksanaan Program POSBINDU KIT	7.500.000	Dinas Kesehatan
98.	Program Peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Poktan Guyub Rukun Rt 01 Rw 01 Desa Lumbu	Pengadaan Pompa Air 2 Inch	18.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
99.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	KTT Harapan Mulia Rt 01 Rw 01 Desa Lumbu	Bantuan Ternak Sapi	65.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
100.	Program Peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Gapoktan Usaha Baru Rt 01 Rw 02 Desa Lumbu	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
101.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Lumbu	Terpeliharanya Jalan Kabupaten antar desa dan kecamatan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102.	Program Ketenagalistrikan	Desa Lumbu	Terpasangnya Togor/Jaringan Listrik Perdesaan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103.	Program Peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Desa Jlegiwinangun	Pengadaan Traktor Rotari	75.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
104.	Program Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak	Poktan Sumber Rejeki Desa Jlegiwinangun	Bantuan Ternak Sapi	65.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
105.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Desa Jlegiwinangun	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	50.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
106.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Desa Jlegiwinangun	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Desa Jlegiwinangun	Pembangunan Normalisasi Drainase	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108.	Program Pemberdayaan Sosial	Desa Jlegiwinangun	Pengelolaan Budidaya Ikan	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
109.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Peslakan	Pembangunan Talud Jalan K1	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Desa Peslakan	Dam Parit	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
111.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Desa Pesalakan	Pemeliharaan SPAM Perdesaan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112.	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Peslakan	Pembangunan Ruas jalan kaliputih-jatipurus kecamatan poncowarno	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volumen</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
113.	Program Pengelolaan Pendidikan	Desa Pesalakan	Terbangunnya Gedung PAUD Formal (TK)	300.000.000	Dinas Pendidikan



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

##### **A. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen**

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. Arif Sugiyanto, S.H selaku Bupati dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M selaku Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Kutowinangun melakukan berbagai program dan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Disamping itu Pemerintah juga untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi lokal dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat yang sudah tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan system pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang modern yang mampu merespon dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat mengakomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Kutowinangun adalah Misi 1 (satu), yaitu *“Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi”*.

##### **B. Tujuan dan sasaran Renja**

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan dari Kecamatan Kutowinangun adalah *“Mewujudkan*

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif”. Sementara sasarannya terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 7 (tujuh). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Kutowinangun tahun 2022 disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutowinangun**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik ( <i>clean and good governance</i> )	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%

### C. Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pelaksanaan tugas Camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan tugas tugas umum pemerintahan di kecamatan.
2. Pembinaan desa.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
4. Pembinaan pemberdayaan masyarakat.
5. Pembinaan kesejahteraan rakyat dan.
6. Pembinaan pelayanan umum.

**a) Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan**

**Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah**

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut :

- Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas pelayanan publik;
- Keterbukaan informasi publik sebagai media transparasi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintah;
- Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
- Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
- Adanya komitmen Bersama untuk tidak melakukan Tindakan KKN.

**SDGs**

Dalam pelaksanaan pemutakhiran IDM yang berbasis SDG's sudah dilaksanakan di Desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun sebanyak 18 Desa sampai bulan Juni 2021 sudah menetapkan berita acara Musyawarah Penetapan Hasil Pendataan SDGs, tinggal 1 Desa yang belum menetapkan berita acara penetapan SDGs di targetkan sampai bulan Desember sudah 100% . Sedangkan proses input ke aplikasi sedang proses . Target Tahun 2022 Melalui SDGs setiap warga desa berhak terbebas dari kemiskinan, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga berhak hidup dalam perdamaian. SDGs Desa ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

**Pengentasan Kemiskinan**

Jumlah Penduduk miskin di Wilayah Kecamatan Kutowinangun terdapat 3.935 KK dalam rangka menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2022 ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Diantaranya: sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu

jaminan kesehatan; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pembinaan dan pendampingan kepada UKM, akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

### **BUMDes**

Pada tahun 2022 Desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun ditargetkan sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sudah berbadan hukum. Tujuan dari dibentuknya BUMDes untuk mengelola usaha desa memanfaatkan aset, menjual dan membeli hasil produk UMKM yang ada di Desa, Kecamatan Kutowinangun melaksanakan fasilitasi melalui rapat koordinasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BUMDes agar bisa meningkatkan perekonomian desa.

### **APBDes**

Desa pada Kecamatan Kebumen sedang proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Salah satu fungsi tugas Kecamatan Kutowinangun memberikan pendampingan dan koordinasi agar target kegiatan terlaksana dengan baik.

### **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah (Program DAPAT)**

Daftar Prioritas Usulan Dana Afirmasi Pembangunan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 untuk tersedianya bahan mie soun, tersedianya bahan baku dan meningkatnya produksi emping dan terfasilitasinya pengembangan budidaya lebah madu. Dari kegiatan tersebut di prioritaskan untuk desa Jlegiwinangun, Triwarno, Korowelang, Pejagatan, Ungaran, Mrinen, Lumbu, Babadsari, Tunjungseto, Pekunden, Kaliputih dan Pesalakan.

### **b) Uraian Garis Besar mengenai rakapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan**

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk usulan renja tahun 2022 yaitu ada 4 program, 9 kegiatan dan 29 sub Kegiatan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan Nomenklatur unsur kewilayahan, program,

kegiatan, dan sub kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan adanya perubahan tersebut merubah pula kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 komponen tersebut tersaji dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Review Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun**  
**Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Permendagri No.90/2019</b>
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4. Pemeliharaan Mebel 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pemeliharaan/Rehabilitasi)	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1. Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
		Pemerintahan Daerah		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 memuat program, kegiatan serta pagu indikatif Kecamatan Kutowinangun. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kutowinangun.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023 Kecamatan Kutowinangun dapat dilihat dari format hasil entry SIPD sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN

Lembar 1 s/d 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01									2,037,833,000					2,137,960,000		
7	01	01								1,809,683,000					1,839,960,000		
7	01	01	2.01							6,650,000					10,000,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	6,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.02							1,624,460,000					1,624,460,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan, Jumlah ASN yang mendapatkan gaji Tamsil	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang, 18 Orang	100 %	1,624,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,624,460,000
7	01	01	2.06							34,000,000					40,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya kegiatan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100%	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,000,000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terselenggaranya kegiatan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,000,000
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>61,600,000</b>					<b>64,000,000</b>
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Prosentase Terselenggaranya kegiatan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	33,600,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	23,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PersentaseTerlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	41,000,000
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>35,000,000</b>					<b>39,000,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor, Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,000,000
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>47,973,000</b>				<b>62,500,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100%	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,500,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan	Kab. Kebumen, Semua	100 %	1 Unit	100 %	20,973,000	Dana Transfer Umum-		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								daerah			
<b>7</b>	<b>01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>88,150,000</b>					<b>97,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>							<b>88,150,000</b>					<b>97,000,000</b>	
7	01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Persentase Pengajuan KTP dan Perijinan yang Tertangani	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	1 Jenis	100%	3,150,000	Dana Transfer UmumD ana Alokasi Umum		Persentase terselenggarannya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,000,000
7	01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Capaian Peningkatan pelayanan kecamatan	Jumlah Pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Persentase Pengajuan KTP dan Perijinan Yang Tertangani	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	1 Jenis	100 %	85,000,000	Dana Transfer UmumD ana Alokasi Umum		Persentase terselenggarannya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90,000,000
<b>7</b>	<b>01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>28,000,000</b>					<b>40,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>28,000,000</b>					<b>40,000,000</b>	
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan HUT RI	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibraka, Carnaval, Resepsi HUT RI dan Hari Jadi)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	3 Kegiatan	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggarannya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40,000,000
<b>7</b>	<b>01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>112,000,000</b>					<b>161,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 06 2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>112,000,000</b>					<b>161,000,000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperann dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	19 Desa	100 %	25,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100 %	36,500,000
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperann dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan Pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100%	14,700,000	Dana Transfer UmumD ana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100 %	21,000,000
7 01 06 2.01 10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	5.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100%	8.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan Musrenbangdes/kel; Jumlah Kali Kegiatan Pra Musrenbangca m	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan Pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	19 Desa, 1 Kali	100 %	25,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100 %	36,500,000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKS, JUmlah Kegiatan Pembinaan BUMDES, Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, JUmlah Kegiatan Sosialisasi Masyarakat	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Kali, 1 Kegiatan, 3 Kegiatan	100 %	32,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan daerah, JUmlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100 %	48,000,000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Sembako, Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/Ke l	Persentase desa yang di Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Kebumen, Kutowinang un, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan, 1 Kegiatan	100 %	7,350,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah, Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa, Terfasilitasi kegiatan TKP2KDes	100 %	11,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							<b>TOTAL</b>	<b>2,037,833,000</b>					<b>2,137,960,000</b>	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyiapkan Renja-SKPD.

Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Kutowinangun dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Semoga Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun pada tahun 2022. Serta dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Kecamatan Kutowinangun dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan layanan publik yang berkualitas untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Kebumen, 10 September 2021



Pembina Tingkat I

NIP. 19640405 199401 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Jinggirani R	
Tanahil	